

ANALISIS DAMPAK GLOBALISASI, KEBIJAKAN FISKAL, DAN MODAL MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF : STUDI KASUS DENGAN DATA PANEL PADA 9 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(Analysis The Impact of Globalization, Fiscal Policy, and Human Capital on Inclusive Economic Growth : A Case Study on Panel Data 9 Districts in East Kalimantan Province)

Rezaneri Noer Fitrianasari

BPS Kabupaten Kutai Timur

E-mail: rezaneri.noer@bps.go.id

Submitted: 30 Oktober 2021 | *Accepted:* 29 Desember 2021

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi dikatakan inklusif apabila dapat memberi manfaat bagi masyarakat bawah seperti dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kalimantan Timur merupakan provinsi yang mempunyai nilai PDRB dan pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang rendah. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui capaian pertumbuhan ekonomi inklusif serta dampak globalisasi, kebijakan fiskal, dan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Kalimantan Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel 9 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan model *Fixed Effect Model Cross-Section SUR*. Hasil temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif di Kalimantan Timur beserta 9 kabupaten/kota (kecuali Mahakam Hulu) termasuk kategori memuaskan. Variabel penanaman modal asing (PMA), keterbukaan perdagangan, persentase pengeluaran kesehatan, persentase pengeluaran pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi Kalimantan Timur.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Keterbukaan Perdagangan, Kesehatan, Pendidikan, IPM

ABSTRACT

Economic growth is said to be inclusive if it can provide benefits for the lower classes shown by reduction in poverty rate, income inequality, and unemployment rate. East Kalimantan is a province that has a high value of GDP and per capita income, but it is not followed by a low level of poverty, inequality, and unemployment. Therefore, this study examines the achievement of inclusive economic growth and the impact of globalization, fiscal policy, and human capital on inclusive economic growth in East Kalimantan Province. The analytical method used is panel data regression analysis of 9 regencies/cities in East Kalimantan Province with the Fixed Effect Model Cross-Section SUR model. The findings show that inclusive economic growth in East Kalimantan and 9 regencies/cities (except Mahakam Hulu) is in the satisfactory category. Variables of foreign investment (FDI), trade openness, percentage of health expenditure, percentage of education expenditure, and human development index (HDI) are also proved to have a positive and significant effect on the inclusive economic growth index (IEGI) in East Kalimantan Province.

Keywords: *Inclusive Economic Growth, Trade Openness, Health, Education, HDI*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi inklusif telah menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan oleh akademisi dan praktisi ekonomi pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. World Bank mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang merata dan dapat menciptakan kesetaraan kesempatan bagi semua orang melalui penciptaan lapangan kerja, perluasan pasar, konsumsi, serta produksi bagi masyarakat miskin sehingga kondisi hidup lebih baik dapat tercapai (Klasen, 2017). Pertumbuhan ekonomi inklusif mendorong setiap individu untuk mengakses

pendidikan, kesehatan, dan komponen lainnya yang menunjang standar hidup yang lebih baik (Kristyanto & Kaluge, 2018).

Kalimantan Timur adalah contoh provinsi yang mengalami *growth without development*. Pertumbuhan ekonomi daerah memang terjadi namun pembangunan tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat Kalimantan Timur (Kuncoro & Idris, 2015). Kalimantan Timur menjadi provinsi terkaya ke-8 di Indonesia dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 607.320,78 Milyar. Bahkan, pendapatan perkapita Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebesar Rp 160,109 juta menjadi yang tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta (BPS, 2020). Provinsi Kalimantan Timur terkenal kaya dengan sumber daya alam (SDA) terutama minyak, gas bumi, batubara, perikanan dan kelautan serta hasil-hasil hutan yang melimpah. Sayangnya, kekayaan alam Kalimantan Timur belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercermin dari nilai persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan ketimpangan antar daerah. Pada Maret 2020 tercatat persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur sebesar 6,10 persen. Kalimantan Timur juga masih belum mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup sehingga tercatat 6,87 persen angkatan kerja di Kalimantan Timur yang menganggur pada Agustus 2020. Nilai gini ratio sebagai indikator ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur pada Maret 2020 sebesar 0,328 membuat Kalimantan Timur termasuk kedalam wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang moderat.

Tabel 1. Nilai PDRB per kapita, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2020.

Kab/Kota	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	Kemiskinan	Ketimpangan Pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka
Paser	148,63	9,23	0,290	4,52
Kutai Barat	183,84	9,29	0,338	4,97
Kutai Kartanegara	185,65	7,31	0,294	5,70
Kutai Timur	296,16	9,55	0,325	5,45
Berau	148,90	5,19	0,300	5,08
Penajam Paser Utara	55,70	7,36	0,292	6,22
Balikpapan	155,98	2,57	0,311	9,00
Samarinda	75,04	4,76	0,324	8,26
Bontang	312,15	4,38	0,405	9,46
Kalimantan Timur	160,11	6,10	0,328	6,87

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Capaian pembangunan Kalimantan Timur juga belum merata dirasakan oleh seluruh kabupaten/kota. **Tabel 1** diatas menyajikan nilai PDRB per kapita, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran terbuka yang sangat timpang antar 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kota Bontang sebagai wilayah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi justru memiliki tingkat ketimpangan dan pengangguran tertinggi juga. Sementara Kabupaten Kutai Timur mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan Timur, tetapi tingkat penganggurannya lebih rendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Di sisi lain, meskipun Kutai Timur memiliki PDRB per kapita yang tinggi, namun ketimpangan pendapatannya juga tertinggi ketiga. Kota Balikpapan adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah, yaitu sebesar 2.57 persen, tetapi memiliki tingkat pengangguran yang tertinggi kedua di Kalimantan Timur. Kabupaten Paser adalah kabupaten dengan tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Timur, tetapi justru memiliki tingkat kemiskinan tertinggi kedua setelah Kabupaten Kutai Timur.

Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi tujuan ke-8 dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Oleh sebab itu, banyak penelitian dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif agar tujuan ke-8 *SDGs* dapat tercapai pada tahun 2030.

Salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif adalah globalisasi (Khan et al., 2016). Dua pilar globalisasi yang dilakukan Kalimantan Timur dalam bidang ekonomi adalah

investasi asing dan keterbukaan perdagangan. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai bentuk investasi asing dapat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana PMA akan memperkenalkan penerimanya dengan sistem, praktek manajemen dan teknologi yang baru, sekaligus sebagai penghubung ke pasar ekspor dan rantai pasokan internasional (Sri Herianingrum, 2019). Sementara keterbukaan perdagangan adalah gambaran dampak globalisasi yang menjadi fasilitas pergerakan tenaga kerja serta perusahaan menuju sektor-sektor yang memiliki peningkatan permintaan. Keterbukaan perdagangan juga dapat dijadikan sebagai media datangnya teknologi baru yang mampu mendorong produktivitas dan peningkatan lapangan kerja yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi inklusif (Khan et al., 2016).

Sementara itu, kebijakan fiskal melalui penggunaan instrumen pemerintah sangat berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Studi empiris membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan signifikan efektif dalam menurunkan tingkat kesenjangan (Claus et al., 2012). Pertumbuhan inklusif dapat tercapai melalui rancangan anggaran pemerintah yang baik dan benar. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan akan berimplikasi terhadap pertumbuhan inklusif apabila diprioritaskan untuk masyarakat miskin, kesehatan dan pendidikan adalah asset utama yang dimiliki oleh masyarakat miskin (Estrada et al., 2014).

Selanjutnya, perbaikan modal manusia yang merupakan perbaikan investasi dalam bidang sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Raheem et al., 2018). Modal manusia diyakini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Meningkatnya status kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bekerja yang kemudian berdampak pada perbaikan kualitas output yang dihasilkan (Mushkin, 1962).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk mengetahui capaian pertumbuhan ekonomi inklusif pada 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan pengaruh aktivitas globalisasi yang meliputi realisasi penanaman modal asing (PMA) dan keterbukaan perdagangan, pengaruh kebijakan fiskal yang meliputi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan sektor pendidikan, serta pengaruh variabel modal manusia terhadap capaian pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Kalimantan Timur.

METODE

Metode Pengumpulan Data

Cakupan penelitian ini adalah 9 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2020. Kesembilan kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Karena terbatasnya ketersediaan data, Kabupaten Mahakam Hulu tidak dimasukkan dalam cakupan wilayah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPENAS, dan DJPK Kemenkeu sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel yang digunakan.

Variabel	Nama	Keterangan
IPEI	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Merupakan indeks komposit yang diukur melalui aspek pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, serta akses kesempatan (1-10) 1-3: kurang memuaskan 4-7: memuaskan 8-10: sangat memuaskan
PMA	Realisasi Penanaman Modal Asing	Realisasi dalam US dollar
KP	Derajat Keterbukaan Perdagangan	Rasio dari jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB kab/kota (%)

PKES	Persentase Pengeluaran Fungsi Kesehatan	Persentase pengeluaran kesehatan terhadap total pengeluaran kab/kota (%)
PPEND	Persentase Pengeluaran Fungsi Pendidikan	Persentase pengeluaran pendidikan terhadap total pengeluaran kab/kota (%)
IPM	Indeks Pembangunan Manusia	-

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensia. Analisis deskriptif dilakukan melalui grafik yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan *software MS. Excel* yang bertujuan mengetahui capaian pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Kalimantan Timur. Analisis inferensia yang digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh beberapa variabel, seperti: PMA, keterbukaan perdagangan, persentase belanja pendidikan, persentase belanja kesehatan, dan IPM, terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di 9 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah Analisis Regresi data panel dengan *software Eviews 12*. Analisis regresi data panel adalah metode regresi dengan menggabungkan data antar waktu (*time series*) dan data antar individu (*cross section*). Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$IPEI_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 PMA_{it} + \gamma_2 KP_{it} + \gamma_3 PKES_{it} + \gamma_4 PPEND_{it} + \gamma_5 IPM_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

dimana:

- γ_0 = intersep
- $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_5$ = koefisien regresi variabel penjelas
- $IPEI_{it}$ = indeks pertumbuhan ekonomi inklusif kabupaten/kota i, tahun ke-t
- PMA_{it} = realisasi penanaman modal asing kabupaten/kota i, tahun ke-t (US dolar)
- KP_{it} = tingkat keterbukaan perdagangan kabupaten/kota i, tahun ke-t (persen)
- $PKES_{it}$ = persentase pengeluaran kesehatan kabupaten/kota i, tahun ke-t (persen)
- $PPEND_{it}$ = persentase pengeluaran pendidikan kabupaten/kota i, tahun ke-t (persen)
- IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota i, tahun ke-t
- ϵ_{it} = residual untuk provinsi i, tahun ke-t
- i = kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Paser, Kutai Barat, . . . , Bontang)
- t = 2011, 2016, ..., 2020

Prosedur analisis regresi data panel yang pertama dilakukan adalah pengujian *unit root*. Pengujian dilakukan berbasis data panel menggunakan statistik uji Levin Lin Chu (LLC) dengan hipotesis nol (H_0) data tidak stasioner (Levin et al., 2002).

Terdapat tiga model estimasi yang dapat digunakan dalam analisis regresi data panel, yaitu *common effect model* (CEM) yang mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pooled*, *fixed effect model* (FEM) yang mengakomodasi perbedaan individu melalui perbedaan intersep sehingga intersep termasuk parameter yang akan diestimasi, dan *random effect model* (REM) yang mengasumsikan setiap individu mempunyai perbedaan intersep variabel random atau stokastik (Greene, 2002). Untuk memilih model terbaik dilakukan uji Chow dengan hipotesis nol CEM lebih baik daripada FEM dan statistik uji sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(SSE_1 - SSE_2) / (N - 1)}{SSE_2 / (NT - N - k)} \sim F_{\alpha; (N-1), (NT-N-k)} \dots \dots \dots (2)$$

Kemudian dilakukan uji Hausman dengan hipotesis nol tidak terdapat korelasi antar variabel independen dan efek individu atau REM lebih baik daripada FEM. Statistik uji Hausman adalah sebagai berikut:

$$W = [\hat{\beta}_{OLS} - \hat{\beta}_{GLS}]' [V(\hat{\beta}_{OLS}) - V(\hat{\beta}_{GLS})]^{-1} [\hat{\beta}_{OLS} - \hat{\beta}_{GLS}] \sim \chi^2_{\alpha; k} \dots \dots \dots (3)$$

Uji Breush-Pagan dilakukan untuk memilih apakah CEM atau REM yang lebih baik. Hipotesis nol yang digunakan adalah intersep tidak bersifat random atau CEM lebih baik daripada REM dengan statistik uji sebagai berikut:

$$LM = \frac{NT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^N (\sum_{t=1}^T \epsilon_{it})^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \epsilon_{it}^2} - 1 \right]^2 \sim \chi^2_{\alpha; 1} \dots \dots \dots (4)$$

Apabila sudah terpilih metode estimasi terbaik, selanjutnya dilakukan pemilihan estimator struktur varian kovarian residual menggunakan pengujian *Lagrange Multiplier* dengan hipotesis nol struktur varian kovarian residual bersifat homoskedastik dan tidak terdapat *cross sectional correlation*.

Untuk membangun persamaan regresi panel terbaik dari kriteria ekonometrik, dilakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran asumsi dasar. Pemeriksaan pertama adalah asumsi normalitas residual menggunakan statistik uji Jarque Berra (JB) dengan hipotesis nol residual berdistribusi normal. Statistik uji JB dirumuskan sebagai berikut:

$$JB = NT \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right] \sim \chi^2_{\alpha;2} \dots\dots\dots (5)$$

Kemudian untuk memenuhi asumsi non-autokorelasi dilakukan pemeriksaan menggunakan statistik uji Durbin Watson (DW). Apabila nilai statistik uji DW berkisar diantara 2 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Uji asumsi homoskedastisitas dilakukan menggunakan uji LM setelah model estimasi terbaik untuk memilih estimator yang tepat. Selanjutnya, untuk memenuhi asumsi non multikolinieritas dilakukan pemeriksaan *simple pairwise (Pearson) correlation* antar variabel independen. Antar variabel independen berkorelasi tinggi apabila memiliki koefisien lebih dari 0,80.

Uji keberartian model dilakukan dengan melihat koefisien determinasi, uji simultan dan uji parsial. Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa baik garis regresi sampel fit pada data. Secara matematis, koefisien determinasi yang disesuaikan dirumuskan sebagai berikut.

$$\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{NT-1}{NT-N-k} \dots\dots\dots (6)$$

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang digunakan adalah variabel independen tidak memberikan pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Statistik uji simultan dirumuskan sebagai berikut.

$$F_{hitung} = \frac{SSR/(N+k-1)}{SSE/(NT-N-k)} \sim F_{\alpha; (N+k-1), (NT-N-k)} \dots\dots\dots (7)$$

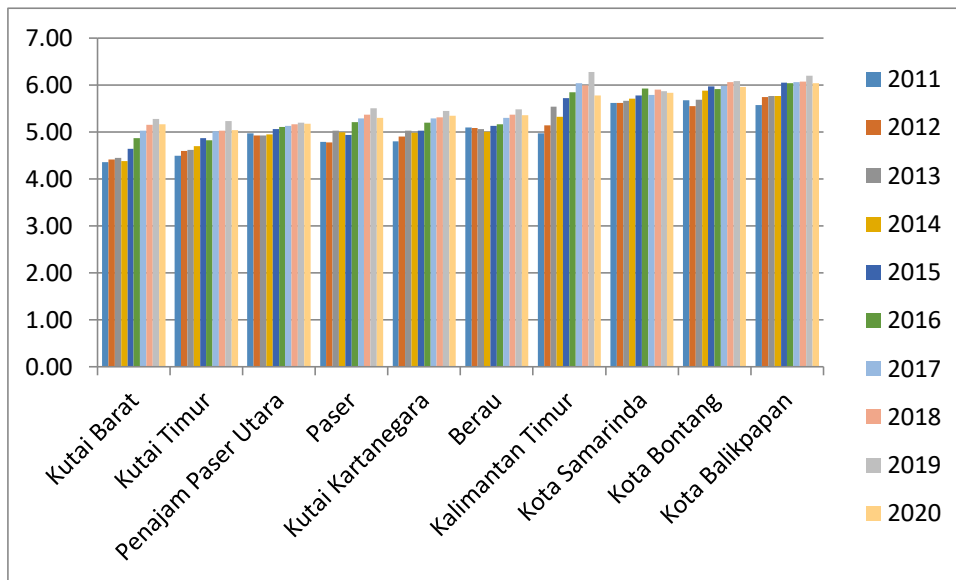
Pengujian parameter secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang digunakan adalah variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan statistik uji t:

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_j}{se(\hat{\beta}_j)} \sim t_{\alpha; NT-N-k} \dots\dots\dots (8)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indeks komposit yang disusun oleh BAPPENAS dan digunakan untuk memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan. IPEI diukur melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Pada tahun 2011 hingga 2020 nilai Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) di provinsi Kalimantan Timur dan 9 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur berkisar antara 4 hingga 7, yang artinya capaian pertumbuhan ekonomi inklusif di Kalimantan Timur telah memuaskan. Selama 10 tahun IPEI Provinsi Kalimantan Timur memiliki tren yang terus meningkat, yaitu sebesar 5 pada tahun 2011, sempat turun pada tahun 2014, kemudian meningkat lagi hingga mencapai 6,27 pada tahun 2019 sebelum kembali turun akibat pandemi. Pada tahun 2020 IPEI seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengalami penurunan karena pandemi covid berdampak pada kontraksi ekonomi dan penurunan PDRB per kapita, serta meningkatnya kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.



Sumber: BAPPENAS (diolah)

Grafik 1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2020

Sebagaimana **Grafik 1**, Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur adalah dua kabupaten yang memiliki rata-rata IPEI terendah selama 10 tahun. Nilai IPEI kedua kabupaten ini dibawah 5 yaitu sebesar 4,77 dan 4,84. Menurut data BPS, kedua kabupaten ini sebenarnya memiliki pendapatan perkapita yang tinggi atau diatas nilai provinsi tetapi tingkat kemiskinan kedua kabupaten tersebut merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur. Artinya kue ekonomi di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur tidak dinikmati oleh seluruh penduduk dibuktikan dengan persentase ketimpangan yang masih cukup tinggi.

Nilai IPEI Kabupaten Penajam Paser Utara (5,06), Kabupaten Paser (5,12), Kabupaten Kutai Kartanegara (5,13) dan Kabupaten Berau (5,20) lebih besar dari 5 tetapi masih dibawah nilai IPEI Provinsi Kalimantan Timur.

Tiga kota administrasi di Kalimantan Timur mempunyai rata-rata IPEI lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi yaitu Kota Samarinda (5,77), Kota Bontang (5,87), dan Kota Balikpapan (5,93). Capaian pertumbuhan ekonomi inklusif di ketiga wilayah tersebut lebih baik dibandingkan wilayah lainnya dibuktikan dengan kesuksesan Pemerintah Kota dalam menekan angka kemiskinan.

Pengaruh Globalisasi, Kebijakan Fiskal, dan Modal Manusia Terhadap Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Hasil pengujian *unit root* terhadap data dengan menggunakan uji LLC menunjukkan nilai *p-value* pada semua variabel bernilai kurang dari 0,05, sehingga keputusan tolak H_0 atau semua variabel telah signifikan stasioner pada taraf signifikansi 5 persen.

Selanjutnya untuk menganalisis dampak globalisasi, kebijakan fiskal, dan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dilakukan estimasi model regresi data panel. Setelah dihasilkan tiga jenis model estimasi data panel, yaitu CEM, FEM, dan REM dilakukan uji untuk menentukan model estimasi terbaik. Berdasarkan hasil uji Chow didapatkan keputusan menolak H_0 pada tingkat signifikansi 5 persen sehingga dapat diambil kesimpulan sementara FEM lebih baik daripada CEM. Kemudian dilanjutkan dengan uji Hausman yang juga memberikan keputusan tolak H_0 pada tingkat signifikansi 5 persen, artinya FEM lebih baik daripada REM. Setelah FEM terpilih, dilakukan pengecekan korelasi varian-covarians residual dengan Uji LM yang hasilnya adalah struktur matriks varian kovarian residual bersifat heteroskedastik dan terdapat *cross-section correlation*. Sehingga model estimasi terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *FEM Cross-Section SUR*.

Tabel 3. Hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

<i>Summary Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
Uji Chow	52.069833	8	0.0000
Uji Hausman	27.071853	5	0.0000
Breusch-Pagan LM	59.32960	36	0.0085

Sumber: output Eviews (diolah)

Berdasarkan hasil identifikasi model terbaik yang telah dilakukan, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah FEM *Cross-Section* SUR yang menggunakan metode estimasi *Pooled EGLS*. Metode estimasi *Pooled EGLS* telah mengakomodasi permasalahan autokorelasi dan heteroskedastisitas, sehingga pengujian asumsi yang diperlukan adalah asumsi normalitas dan nonmultikolinieritas. Hasil pengujian asumsi normalitas dengan statistik uji Jarque Berra dihasilkan nilai *p-value* berkisar antara 0,50 – 0,94, sehingga keputusannya terima H_0 yang artinya dengan tingkat signifikansi 5 persen residual seluruh model estimasi telah berdistribusi normal. Nilai korelasi pearson antar variabel bebas berada diantara 0,04 dan 0,29, yang artinya tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dependen atau asumsi non multikolinieritas terpenuhi. Meskipun variabel persentase pengeluaran kesehatan dan pendidikan menurut beberapa penelitian berpengaruh terhadap variabel IPM, tetapi hasil pengujian statistik *pearson correlation* antara pengeluaran kesehatan dan IPM yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,074, sedangkan pengeluaran pendidikan dan IPM adalah sebesar 0,129. Hal ini mengindikasikan hanya terjadi hubungan/korelasi yang kecil antara variabel persentase pengeluaran kesehatan dan pengeluaran pendidikan dengan IPM.

Tabel 4. Ringkasan *output* FEM *Cross-Section* SUR

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-3,909551	0,142220	-27,48950	0,0000
PMA?	9,89E-09	3,37E-09	2,936580	0,0044
KP?	0,002486	0,000235	10,56404	0,0000
PKES?	0,003014	0,000701	4,299264	0,0001
PPEND?	0,003453	0,000307	11,26534	0,0000
IPM?	0,122383	0,001837	66,62619	0,0000
<i>F-statistic</i>		17811,05		
<i>Prob (F-statistic)</i>		0,00000		
<i>Adjusted R-squared</i>		0,958192		

Sumber: output Eviews (diolah)

Berdasarkan hasil uji simultan di atas diperoleh *p-value* 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 5 persen, dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan secara statistik terhadap capaian pertumbuhan ekonomi inklusif.

Berdasarkan pengujian parsial pada masing-masing variabel, diketahui dengan tingkat signifikansi 5 persen seluruh variabel independen di dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan R^2 yang disesuaikan (*adjusted R-squared*) sebesar 95,8 persen. Variabel globalisasi, yaitu realisasi PMA dan keterbukaan perdagangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap capaian pertumbuhan ekonomi inklusif pada 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Dimana koefisien regresi PMA sebesar $9,89 \times 10^{-9}$ mempunyai arti bahwa kenaikan realisasi PMA sebesar 1 US dolar akan dapat meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi inklusif (IPEI) sebesar $9,89 \times 10^{-9}$ poin. PMA sebagai variabel investasi asing dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga masalah kemiskinan dapat berkurang. Selain itu investasi yang dilakukan pada proyek bersifat padat karya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga

pertumbuhan akan merata. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anand et al., 2016). Investasi asing di Kalimantan Timur masih relatif kecil, padahal Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan peluang investasi yang luas di sektor-sektor seperti minyak dan gas, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, serta perkebunan. Dalam 10 rentang periode penelitian (2011-2020) kabupaten/kota yang mendapatkan investasi asing terbesar adalah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara memperoleh realisasi investasi asing terkecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kalimantan Timur perlu menarik investasi asing untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur, serta mendorong peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Kawasan Industri Karingau-Buluminung, serta mempercepat proyek strategis Nasional di Balikpapan dan Bontang.

Keterbukaan perdagangan (*trade openness*) memiliki koefisien regresi sebesar 0,002 yang artinya apabila terjadi kenaikan derajat keterbukaan perdagangan sebesar 1 persen akan meningkatkan IPEI sebesar 0,002 poin. Artinya aktivitas globalisasi ternyata memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap capaian pertumbuhan ekonomi inklusif pada 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Penelitian di Indonesia pada tahun 2016 menyimpulkan derajat keterbukaan perdagangan terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kusumaningrum, S., Yuhan, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan globalisasi ekonomi telah membawa dampak yang positif dan menguntungkan bagi Kalimantan Timur karena integrasi di dalam dunia ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya membantu untuk memecahkan masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Kabupaten/kota yang kaya akan hasil tambang rata-rata memiliki tingkat keterbukaan perdagangan yang tinggi, ditopang oleh aktivitas ekspor hasil tambang, yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, dan Kota Bontang. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda memiliki derajat ketebukaan yang relatif kecil. Perekonomian pada tiga wilayah ini lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.

Variabel kebijakan fiskal, yaitu persentase belanja kesehatan dan pendidikan juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPEI yang merupakan ukuran capaian pertumbuhan ekonomi inklusif. Koefisien regresi persentase pengeluaran kesehatan adalah 0,003, artinya apabila terjadi kenaikan persentase pengeluaran kesehatan sebesar 1 persen, maka IPEI akan mengalami kenaikan sebesar 0,003 poin. Sementara koefisien regresi persentase pengeluaran pendidikan sebesar 0,0034 mempunyai makna kenaikan persentase pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebesar 1 persen dapat meningkatkan nilai IPEI sebesar 0,0034 poin. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Jawa Timur dan DIY (Christianto et al., 2017; Pratiwi & Ismal, 2017).

Apabila dilihat porsinya dari total pengeluaran, persentase pengeluaran kesehatan pada 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur masih memiliki porsi yang kecil dibandingkan dengan pengeluaran sektor lainnya seperti infrastruktur dan pendidikan yaitu sekitar 11 persen, namun alokasi yang tepat menjadikan layanan kesehatan dapat dinikmati oleh orang yang tepat dan pada akhirnya mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Samarinda adalah kabupaten/kota yang memiliki persentase pengeluaran kesehatan dibawah rata-rata seluruh kabupaten/kota, yaitu masing-masing sebesar 6,86 persen, 8,32 persen, dan 9,15 persen. Keenam kabupaten/kota lainnya rata-rata membelanjakan lebih dari 11 persen dari total anggarannya untuk sektor kesehatan, bahkan Kota Bontang mencapai 14,39 persen dan Kabupaten Paser sebesar 12,69 persen. Sementara rata-rata persentase pengeluaran pendidikan pada 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur belum semua sesuai dengan mandat undang-undang yaitu lebih dari 20 persen. Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang selama 10 tahun terakhir memiliki rata-rata persentase pengeluaran pendidikan dibawah 20 persen. Sementara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda memiliki rata-rata persentase pengeluaran pendidikan sekitar 24 persen selama 10 tahun terakhir. Meskipun ketika dicermati pada masing-masing kabupaten/kota masih terjadi perbedaan yang timpang, namun anggaran pendidikan yang tepat sasaran yaitu membantu seluruh penduduk untuk dapat mencapai kebutuhan dasar akan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga dapat

terserap pada pasar kerja. Penduduk yang berpendidikan, sehat dan produktif inilah yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi angka pengangguran di Kalimantan Timur.

IPM memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada taraf 5 persen, dimana koefisien regresi IPM adalah 0,122. Artinya setiap kenaikan IPM sebesar 1 poin maka nilai IPEI juga akan meningkat sebesar 0,122 poin. Hasil ini membuktikan bahwa perbaikan modal manusia menjadi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang lebih inklusif karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan sebagaimana penelitian yang dilakukan sebelumnya (Raheem et al., 2018). IPM Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi ketiga di Indonesia dengan kategori tinggi. Meskipun demikian, tingginya capaian IPM Kalimantan Timur tidak diiringi dengan pemerataan di seluruh kabupaten/kota. Enam kabupaten/kota yang menjadi cakupan penelitian mendapatkan IPM dengan kategori tinggi yaitu sebesar 70 hingga 80. Bahkan tiga diantaranya telah mendapatkan predikat IPM sangat tinggi (lebih dari 80) pada tahun 2019 dan 2020, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Disisi lain masih terdapat dua kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang memiliki nilai rata-rata IPM dibawah 70 atau kategori sedang, yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Penajam Paser Utara.

KESIMPULAN

Pada 10 tahun terakhir, nilai IPEI di provinsi Kalimantan Timur dan 9 kabupaten/kota rata-rata berkisar antara 4-7 atau masuk dalam kategori sedang. Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur menjadi kabupaten dengan nilai rata-rata IPEI terendah, sedangkan Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kota Balikpapan memiliki nilai rata-rata IPEI tertinggi dan diatas nilai rata-rata IPEI provinsi Kalimantan Timur.

Globalisasi, kebijakan fiskal, dan modal manusia ternyata memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap capaian pertumbuhan ekonomi inklusif pada 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Secara umum perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dapat dimulai dengan peningkatan penanaman modal asing (PMA), keterbukaan perdagangan, persentase belanja kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Secara khusus pada tingkat kabupaten/kota, perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel yang lemah di masing-masing kabupaten/kota. Dimulai dengan kabupaten/kota dengan nilai IPEI terendah, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur harus meningkatkan alokasi belanja kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan nilai IPM agar kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi inklusif. Sementara yang harus dilakukan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara adalah meningkatkan aktivitas globalisasi, yaitu menarik lebih banyak investor asing dan memperluas ekspor. Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau dapat meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menarik investasi asing yang lebih besar. Untuk kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda perlu melakukan perbaikan kesehatan dengan menambah anggaran belanja dan memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya Kota Bontang perlu menambah anggaran pendidikan sesuai mandat UU yaitu lebih dari 20 persen. Meskipun telah memiliki IPEI tertinggi, Kota Balikpapan dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan memperluas aktivitas ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, R., Mishra, S., & Peiris, S. J. (2016). *Inclusive Growth: Measurement and Determinants*.
- Christianto, P. I., Ashar, K., & Manzilati, A. (2017). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 81–99.
- Claus, I., Martinez-vazquez, J., Vulovic, V., Claus, I., & Martinez-vazquez, J. (2012). Government Fiscal Policies and Redistribution in Asian Countries. *ADB Economics Working Paper Series Government Fiscal Policies and Redistribution in Asian Countries*, 310.

- Estrada, G., Lee, S., & Park, D. (2014). Fiscal Policy for Inclusive Growth: An Overview. *ADB Economics Working Paper Series*, 423.
- Greene, W. H. (2002). Econometric Analysis (5th Edition). In *Journal of the American Statistical Association* (Vol. 89, Issue 428). <https://www.jstor.org/stable/2291031?origin=crossref>
- Khan, G., Safdar, S., Munir, S., & Andlib, Z. (2016). *Measurement and Determinants of Inclusive Growth: A Case Study of Pakistan Measurement and Determinants of Inclusive Growth: A Case Study of Pakistan (1990-2012)*. *March 2019*, 455–466. <https://doi.org/10.30541/v55i4I-IIpp.455-466>
- Klasen, S. (2017). Measuring and monitoring inclusive growth in developing and advanced economies: Multiple definitions, open questions and some constructive proposals. *ADB Sustainable Development Working Paper Series*, 12, 123–144. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447332497.003.0006>
- Kristyanto, V. S., & Kaluge, D. (2018). Peningkatan Inklusivitas Ekonomi Melalui Pembiayaan Investasi Modal Manusia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 170. <https://doi.org/10.24843/jekt.2018.v11.i02.p04>
- Kuncoro, M., & Idris, A. N. (2015). Mengapa Terjadi Growth Without Development Di Provinsi Kalimantan Timur? *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 172. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i2.323>
- Kusumaningrum, S., Yuhan, J. (2019). PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA BERDASARKAN INDEKS KOMPOSIT PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 10(1), 1–86.
- Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. *Journal of Econometrics*, 108(1), 1–24. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(01\)00098-7](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00098-7)
- Mushkin, S. J. (1962). Health as an Investment. *Journal of Political Economy*, LXX(5), 129–157.
- Pratiwi, I. E., & Ismal, R. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Sasaran Akhir Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Inklusif di Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia. *Middle East and Islamic Studies*, 4(1), 73–91.
- Raheem, I. D., Isah, K. O., & Adedeji, A. A. (2018). Inclusive growth, human capital development and natural resource rent in SSA. *Economic Change and Restructuring*, 51(1), 29–48. <https://doi.org/10.1007/s10644-016-9193-y>
- Sri Herianingrum, M. S. H. F. T. K. (2019). Makroekonomi dan Penanaman Modal Asing di Indonesia: Bukti Empiris di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi*, 24(2), 288. <https://doi.org/10.24912/je.v24i2.592>